



RENCANA KERJA TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Provinsi Km 1 Penajam

Telp. (0542) 7200413 - Fax. (0542) 7200320

E-mail : inspektorat.ppu@gmail.com Penajam 76141 - Kalimantan Timur



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kerja ini memuat program-program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja tahun 2023 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sepenuhnya dapat ditunjukkan pada rencana kerja tahun 2023 ini.

Penajam, 15 Agustus 2022

Plt. Inspektur Daerah,

Irfan. Bidang Pemerintahan dan Aparatur



Ainie, SE, MM

Pembina Tingkat I

N.P. 19706091992031011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
1. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	18
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah.....	21
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	
4.1. Program dan Kegiatan	23
5. BAB V PENUTUP	26
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	26
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	26
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	27
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
2. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	
3. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan maju Tahun 2023	



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Alur Pikir Penyajian Rencana Kinerja Tahunan	3
---	----------



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewamai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance. Kepemerintahan yang baik (good governance) saat ini merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategis (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), serta laporan pertanggungjawaban kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. Rencana Kerja merupakan uraian lebih mendetail dari rencana strategis yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kerja Tahun 2023 adalah pelaksanaan dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang memuat sasaran strategis yang sudah tercapai



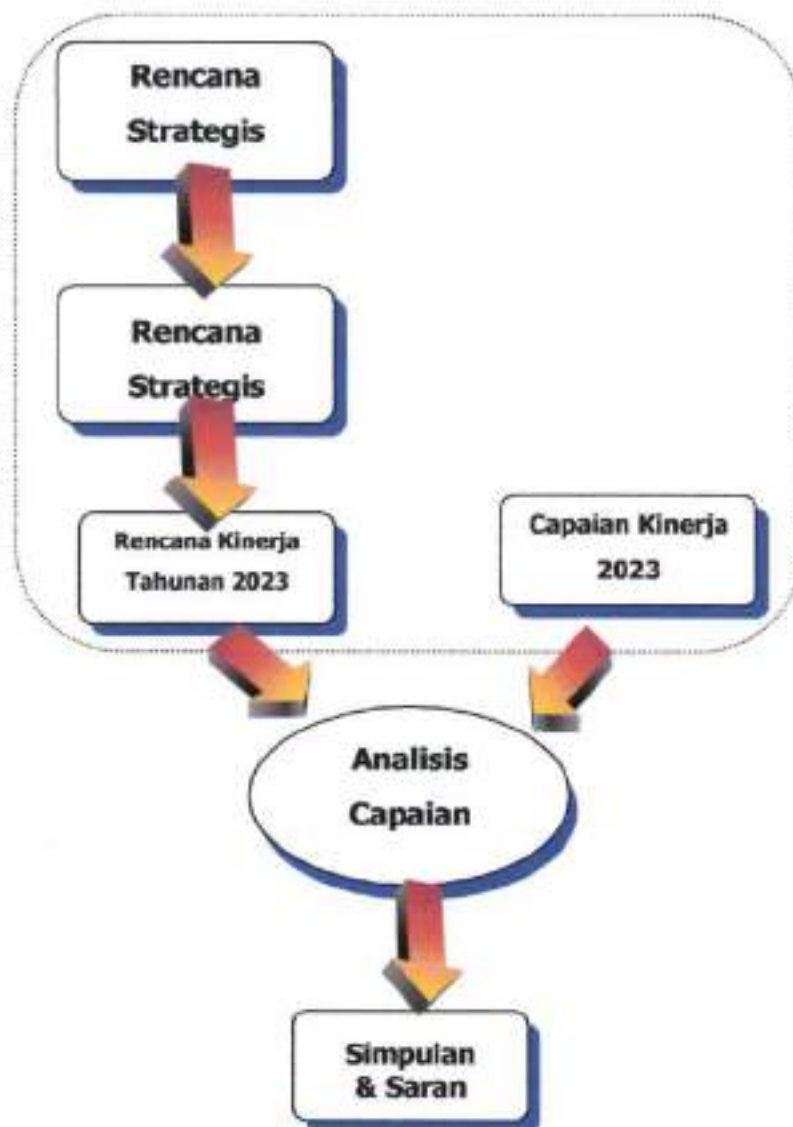
maupun yang belum tercapai. Dari Sasaran Strategis Inspektorat Daerah yang belum tercapai yaitu Masyarakat dan aparatur memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara aman dan damai dengan Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Sasaran Strategis kedua yang belum tercapai yaitu Manajemen Pemerintahan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengawasan secara terpadu dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat dengan Indikator Kinerja Persentase kelengkapan data secara up to date dan akurat. Rencana Kinerja Tahun 2023 juga merupakan tindak lanjut untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023 yang didasarkan atas dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Alur pikir penyajian Rencana Kinerja Tahunan dapat diilustrasikan dalam bagan berikut :



Gambar 1.
Alur pikir penyajian Rencana Kinerja Tahunan



Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang nanti diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2023.



1.2. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Utara adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di rubah dengan Undang–Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);



9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
12. Permedagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.



1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka penyusunan Rencana Kerja ini telah memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Kemampuan keuangan daerah;
- b. Kebutuhan daerah;
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai;
- d. Jenis dan banyaknya tugas;
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- f. Jumlah dan kepadatan penduduk;
- g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani;
- h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan;
- i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023;
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang rinci, terarah dan terukur serta melaksanakan program dan kegiatan yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- (2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan prioritas program



pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara;

- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan;
- (4) Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance;
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.



1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rencana Kerja ini diawali dari :

1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

5. BAB IV PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
2. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
3. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan maju Tahun 2023



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan strategi dan kebijakan instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja tujuan/sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, 2021 dan pada tahun 2022 yang sedang berjalan. Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.



Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Berikut kami sajikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dari beberapa tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 (triwulan I sampai dengan triwulan II) pada Tabel T-C.29 terlampir:

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021 untuk capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yang meliputi 3 program dan dijabarkan ke dalam 10 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan, secara fisik dicapai 61,24% dengan penyerapan dana sebesar 59,30% :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD).
Pelaksanaan kegiatan Evaluasi LKIP OPD, sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada tahun 2023 ini dilaksanakan pada 20 OPD dan telah dilaksanakan evaluasi LKIP pada 21 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sasaran pelaksanaan evaluasi LKIP ini adalah kesesuaian visi, misi, program dan kegiatan, output, outcome, sasaran dan indikator kinerja OPD. Penilaian LKIP OPD terbagi atas 5 (lima) kategori dengan nilai rata-rata hasil kinerja 71,67 (B).
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan sub kegiatan pengawasan internal secara berkala ini sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada tahun 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditargetkan semula hanya 20 LHP dan sampai dengan akhir tahun pengawasan mencapai 23 LHP sehingga capaian kinerja pada kegiatan ini mencapai 115 %.



- c. Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah semula ditargetkan sebanyak 50 LHP sementara capaian kinerja sebanyak 53 LHP sehingga capaian kinerja pada sub kegiatan ini mencapai 106 %.

- d. Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja.

Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja semula dengan target 8 LHR sedangkan capaian kinerja sebesar 3 LHR sehingga capaian kinerja pada sub kegiatan ini mencapai 38 %.

- e. Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan.

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan, sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada tahun 2021. Sasaran pelaksanaan reviu laporan keuangan ini adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dalam rangka mencapai opini WTP oleh BPK-RI.

Kegiatan pemeriksaan ini telah dilaksanakan sesuai dengan PKPT, dan dilakukan reviu laporan keuangan terhadap semua OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan yang ditargetkan 12 LHR terealisasi sebanyak 13 LHR sehingga capaian kinerja pada sub kegiatan ini sebesar 108 %.

- d. Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Desa.

Jumlah LHP Pengawasan Desa ditargetkan sebesar 60 LHP terealisasi sebanyak 18 LHP sehingga capaian kinerja pada sub kegiatan ini sebesar 30%.



- e. Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal.

Jumlah Laporan Kerjasama Internal ditargetkan sebanyak 10 laporan terealisasi sebanyak 25 laporan sehingga capaian kinerja pada sub kegiatan ini sebesar 250 %.

- f. Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Melaksanakan pemantauan/monitoring dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan 368 temuan pemeriksaan, dengan jumlah rekomendasi 836 rekomendasi, yang sudah selesai sesuai rekomendasi 782 rekomendasi, 48 belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut, 0 belum ditindaklanjuti dan 6 tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah.

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencapai 93,54%. Sedangkan pelaksanaan pemantauan/monitoring dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Daerah yaitu 1770 temuan pemeriksaan, dengan jumlah rekomendasi 2785 rekomendasi, yang sudah selesai 2.447 rekomendasi, 281 dalam proses, 57 belum ditindaklanjuti persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sebesar 87,86%. Dalam rangka optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan OPD maupun instansi-instansi terkait.

- g. Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu.

Jumlah LHP Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ditargetkan sebanyak 6 LHP terealisasi sebesar 3 LHP sehingga capaian kinerja pada sub kegiatan ini sebesar 50 %.



- h. Program perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Nilai Indeks pencapaian target kinerja ditargetkan dengan nilai 85 terealisasi dengan capaian nilai 70,64 sehingga capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah sebesar 83,11 %.

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Dalam rangka peningkatan SDM Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 telah melaksanakan dan mengikuti berbagai Diklat, Sosialisasi dan Bimtek antara lain :

- Workshop dan inputing Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan PBJ Triwulan 1 Tahun Anggaran 2021;
- Workshop reviu RKPD, KUA-PPAS dan RKA SKPD di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Diklat Penguatan Tugas-tugas Sekretaris Perangkat Daerah;
- Mengikuti undangan bimbingan teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Pendampingan Pelaksanaan Pelatihan BPD Se-Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Coaching Clinic Pengelolaan keuangan Desa;
- Bimtek Certified Of Government Chief Audit Executive (CGCA) Angkatan ke II Tahun 2021 dengan Metode Pelatihan Mandiri (e-learning);
- Bimtek kompilasi dan integrasi informasi geospasial tematik izin lokasi dan izin usaha perkebunan;
- Diklat Reviu RPJMD dan RKPD bagi Jabatan Fungsional P2UPD Tahun 2021.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :
 - a.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang terdapat di beberapa indikator kinerja yaitu;
 - * Predikat maturitas SPIP pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - * Presentasi laporan data secara online hasil kekayaan aparatur sipil negara yang telah terverifikasi pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - * Jumlah aktifitas konsul pada administrasi umum perangkat daerah dan pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD;
 - * Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - a.2. Program perumusan kebijakan ,pendampingan dan asistensi;
 - * Nilai indeks pencapaian target kinerja pada Pendampingan dan Asistensi dan pada sub pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;
 - * Predikat hasil evaluasi Zona Integritas pada sub kegiatan pendampingan dan asistensi pada sub kegiatan pelaksanaan Zona Integritas WBK.



b. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :

b.1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

- * Opini audit BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan pada sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal;
- * Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal pada sub kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- * Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal pada sub kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- * Persentase penanganan pengaduan masyarakat pada Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu pada sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu.

b.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang terdapat di beberapa indikator kinerja yaitu;

- * Predikat kapabilitas APIP pada perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- * Jumlah APIP yang mengikuti diklat pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- * Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan pada sub kegiatan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan.



- c. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah :
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH yang terdapat di beberapa indikator kinerja yaitu;
- c.1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- * Persentase laporan terhadap hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- c.2. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
- * Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Nilai rata-rata B pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal pada perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- d. Berdasarkan analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan sedangkan beberapa penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah :
- d.1. Factor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
- * Perencanaan yang sudah disusun tidak diikuti dengan pelaksanaan kegiatan sesuai target dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan lebih lama sehingga kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah di tentukan dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - * Kegiatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kondisi covid 19 yaitu adanya pembatasan kegiatan keluar dan bertemu dengan banyak orang;
 - * Sampai dengan saat laporan ini disusun belum ada surat dari Menpan terkait usulan OPD yang ditunjuk untuk menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) namun secara pelaksanaan hasil evaluasi kegiatan sudah mencapai 100%.



- d.2. Factor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
- Perencanaan yang sudah disusun berdasarkan Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas;
 - Komitmen pimpinan yang tinggi tentang pentingnya fungsi pengawasan;
 - Terbentuknya kelompok jabatan fungsional Auditor dan PPUPD guna mendukung pelaksanaan komitmen pimpinan daerah tentang pentingnya fungsi pengawasan;
 - Kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas;
 - Sarana dan prasarana yang mendukung.
- d.3. Factor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan
- Target yang ada di DPA Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 20 LHP sedangkan realisasinya mencapai 23 LHP sehingga capaian kinerja mencapai 115,00%;
 - Target yang akan dicapai pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdapat pada sub kegiatan Evaluasi LKIP Satuan Kerja adalah B dengan nilai sebesar 70 sesuai yang tertuang dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2021 sementara realisasinya mencapai target B dengan nilai sebesar 71,67 sehingga capaian kinerja mencapai 102,39%.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah dan Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



Jika Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dan Program Program perumusan kebijakan ,pendampingan dan asistensi tidak tercapai target kinerjanya antara lain predikat maturitas SPIP menurun maka akan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas, maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Predikat maturitas SPIP sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dimana SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi keandalan pelaporan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan maka kepala OPD untuk dapat mengimplementasikan dan meningkatkan kemampuan Organisasi dalam menerapkan manajemen SPIP.
- b. Lebih cermat dalam menentukan target suatu kegiatan yang akan dicapai dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan dan anggaran yang tersedia.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023 untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa isi-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan :

1. Masih banyaknya temuan-temuan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Masih belum optimalnya penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP);
3. Masih kurangnya kesadaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menindaklanjuti temuan hasil Pemeriksaan internal dan eksternal;
4. Masih belum optimalnya OPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);



5. Belum meratanya kompetensi Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menunjang Kapabilitas APIP;
6. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
7. Dukungan Anggaran belum mencukupi untuk melakukan pengawasan secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi tersebut. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya Tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju yang ingin diwujudkan atau dihasilkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*), pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil;
2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berikut tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mendatang :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Mewujudkan pengawasan yang berkualitas oleh APIP.



Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Karakteristik dari sasaran dapat digambarkan dengan SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness), sebagai berikut :

1. *Specific* yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai.
2. *Measurable* yang berarti dapat diukur sehingga memudahkan dalam penyusunan Laporan kinerja dan evaluasinya.
3. *Acceptable* yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan.
4. *Result* yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil.
5. *Timeliness* yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Berikut sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mendatang :

1. Meningkatnya Penerapan manajemen Pemerintahan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan secara terpadu dan tepat waktu;
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
3. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program sebanyak 3 program, dimana yang bersifat prioritas sebanyak 2 program dan yang bersifat penunjang sebanyak 1 program dengan perincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

2. Kegiatan

Untuk mendukung program-program tersebut diatas, telah ditetapkan kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Kegiatan-kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
 2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3. Reviu Laporan Kinerja
 - 4. Reviu Laporan Keuangan
 - 5. Pengawasan Desa
 - 6. Kerjasama Pengawasan Internal
 - 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
 - 1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- c. Program perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - 1. Pendampingan dan Asistensi.
 - 1. Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 2. Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Berikut Tabel Rencana program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 pada Tabel T-C.33.



BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Sebagai upaya agar tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dapat terlaksana dengan baik, maka perencanaan kinerja perlu dilaksanakan dengan tepat dan terkendali. Dukungan dan peranan seluruh elemen yang ada harus tersinergi dalam satu kesatuan hingga tujuan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk itu dedikasi, kedisiplinan dan kecakapan serta loyalitas adalah hal yang harus dipadukan, sehingga proses pelaksanaan tugas dapat terealisasi dengan baik. Pada tahun 2023 kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan 2 Tujuan 3 Sasaran dengan 3 program, 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan jumlah anggaran dari APBD sebesar Rp. 10.506.524.352,-.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

- a. Di dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



- b. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Inspektorat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara.
- c. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Pada akhir tahun 2023 Inspektur akan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Inspektorat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Penajam, 15 Agustus 2022
Plt. Inspektur Daerah,
Bidang Pemerintahan dan Aparatur



[Handwritten Signature]
H. Aini, SE., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19706091992031011

LAMPIRAN

Tabel 1-C. 29 (Tabel 2.1)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD TAHUN 2021
KABUPATEN PETAJAM PUSAT UTARA

KODE PERMENDAS/SMOT	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TAHUN (N-2) / 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) / 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) / 2022	PERKIRAAN REALISASI OPASIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) / 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) / 2021	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SD TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) / 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8/9/10	9	10	11/12-13-14	12
	Urusan: Urusi Pemerintahan Urusi Pemerintahan										
	Bidang Urusan: Infaqkotori Daerah										
9 31 02	Program: Penyusunan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	5 jenis Laporan	5 jenis Laporan	5 jenis Laporan	5 jenis Laporan	100%	5 jenis Laporan	5 jenis Laporan	5 jenis Laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	20 laporan	20 laporan	21 laporan	21 laporan	100%	21 laporan	21 laporan	72 laporan	340%
	- Prestasi Mutu/asi APR	Prestasi Mutu/asi APR	Level 4	Level 3 (3000)	Level 3 (3000)	Level 2 (2000)	87,50%	Level 3	Level 3	Level 3	
	- Prestasi Mutu/asi BPP	Prestasi Mutu/asi BPP	Level 4	Level 3 (3000)	Level 3 (3000)	Level 3 (3000)	100%	Level 3	Level 3	Level 3	
	Evaluasi LARF Satuan Kerja di Lingkungan Pemda RPJ	Nilai Akurabilitas Kinerja OPD dengan Nilai rata-rata 5	5	5 (95,16)	5	5 (95,16)		5	5 (71,67)	5 (71,67)	
	Penyempurnaan Laporan Hasil Kegiatan Aparatur Sipil Negara (LHRAS)	Persentase laporan data secara online hasil kegiatan Aparatur Sipil Negara yang telah terverifikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi								-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Sub kegiatan	2 Sub kegiatan	2 Sub kegiatan	2 Sub kegiatan	100%	2 Sub kegiatan		4 Sub kegiatan	200%
	Penelitian dan Pelatihan Pegawai Berkeahlian Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang melaksanakan Dilat dan Pelatihan Kantor Bersih	28 Orang	27 Orang	26 Orang	41 Orang	117%	26 Orang	-	98 Orang	354%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	-	2 Kegiatan	200%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	3 bulan	31 bulan	221%
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembekalan gaji dan tunjangan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	3 bulan	31 bulan	221%
	- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah penyelesaian administrasi pelaksanaan tugas ASN	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	16 Orang	-	20 Orang	125%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Pelayanan Kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	27 bulan	45%
	- Penyediaan komponen instalasi laboratorium/anggota layanan kantor	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Laboratorium/anggota Layanan Kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	27 bulan	45%
	- Penyediaan barang cadangan dan penggantian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	27 bulan	45%
	- Penyediaan bahan baku dan peralatan pendukung/undangan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pendukung/undangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	27 bulan	45%

KODE PERENCANAAN SMD	URUSAN /REKAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) / 2018-2019)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-1) / 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) / 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) / 2021	PERKIPAN REALISASI OPYAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) / 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) / 2021	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) / 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8/9/10	9	10	11/12/13	12	
	Penyempurnaan rapat koordinasi dan konsultasi OPO	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi OPO	80 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	27 bulan	28%	
	Pengadaan Sarung milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pengadaan sarung dan pakaian kantor	12 Jenis	12 bulan	10 jenis	12 bulan	100%	10 jenis	-	24 jenis	140%	
	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis pengadaan meubelair	4 Jenis	12 bulan	4 Jenis	12 bulan	300%	4 jenis	-	24 jenis	600%	
	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah jenis pengadaan asat tetap	8 Jenis	12 bulan	8 Jenis	12 bulan	200%	8 Jenis	-	24 Jenis	400%	
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi pelayanan umum kantor	80 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	27 bulan	45%	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	27 bulan	45%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lain-lain	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lain-lain	80 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	27 bulan	45%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	27 bulan	45%	
	Pemeliharaan gedung milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan/pengelolaan kantor	80 br	12 br	12 br	12 br	100%	12 br	3 bulan	27 br	45%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan objek kendaraan pimpinan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pimpinan Dinas atau Kendaraan Jabatan	80 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	27 Bulan	45%	
	Pemeliharaan asat tetap lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	80 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	27 Bulan	45%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	27 Bulan	45%	
8.01.02	Program Penyempurnaan Pengawasan	Jumlah kegiatan Penyempurnaan Pengawasan										
8.01.02.1.01	Penyempurnaan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut	185 Laporan	185 Laporan	185 Laporan	185 Laporan	100%	185 Laporan	185 Laporan	485 Laporan	300%	
8.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Peltaksanaan pengawasan internal secara berkala (Pemeriksaan Rutin))	Jumlah LHP Pengawasan Kinerja (suatu kinerja) Pemerintah Daerah	100.00%	104.84%	100.00%	116.00%	116%	100.00%	0.00%	219.84%	LHP	220%
8.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah LHP Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	350 LHP	- LHP	50 LHP	55 LHP	16%	50 LHP	- LHP	55 LHP	21%	
8.01.02.1.01.03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	40 LHP	3 LHP	8 LHP	3 LHP	8%	8 LHP	0 LHP	8 LHP	15%	
8.01.02.1.01.04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	60 LHP	18 LHP	12 LHP	13 LHP	16%	12 LHP	0 LHP	26 LHP	45%	
	Pengawasan Dana	Jumlah LHP Pengawasan Dana	300 LHP	42 LHP	80 LHP	16 LHP	5%	80 LHP	0 LHP	80 LHP	20%	
8.01.02.1.01.06	Mekanisme Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Mekanisme Pengawasan Internal	50 Laporan	4 Laporan	10 Laporan	20 Laporan	20%	10 Laporan	- Laporan	26 Laporan	56%	
8.01.02.1.01.07	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APOR	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	0% %	93.00%	9%	93.54%	93.48%	9% %	93.54 %	93.22 %		

KODE PERMENDAGRI SMD	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2022)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-2) / 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) / 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) / 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) / 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) / 2021	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) / 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8/7x6	9	10	11x5+7x10	12
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemantauan inspektorat	90 %	83,83%	90%	88,50%	98,11%	90 %	88,30 %	87,14 %	
8 01 02 1 02	Penyempurnaan pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemantauan	90 LHR	8 LHR	8 LHR	3 LHR	30%	8 LHR	- LHR	8 LHR	9%
8 01 02 1 02 02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100,00%	100%	100 %	100%	0%	100 %	0%	2 %	200%
8 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	200%
8 01 03 1 02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan kegiatan pendampingan dan asistensi								-	
8 01 03 1 02 02	Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah laporan evaluasi (MPRE) (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	- Laporan	2 Laporan	4%
8 01 03 1 02 02	Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPRE)	Nilai indeks pencapaian target kinerja	85	80,16	85	80,01	70,80%	85	-	-	0%
8 01 03 1 02 03	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pengaduan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pengaduan dan pemberantasan korupsi	38 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	0 Laporan	14 Laporan	47%

Tabel 1-C.30 (Tabel 2.2)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Indikator	SPN/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+2)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+2)	
1	Persentase laporan terhadap hasil pemeriksaan dengan coyok Pengecekan			100%	100%	100%	100%	115,00%	0,00%	100%	100%	
2	Persentase perancangan pengaduan masyarakat			100%	100%	100%	100%	50%	0,00%	100%	100%	
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK			95%	95%	95%	95%	93,54%	93,54%	100%	100%	
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah			90%	90%	90%	90%	83,83%	87,86%	90%	90%	
5	Persentase perangkat daerah yg nilai SAKIP nya memperoleh nilai minimal (Bak)			80%	80%	80%	80%	105,00%	105,00%	80%	80%	
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai rata-rata B			B	B	B	B	B (71,67)	0,00%	B	B	
7	Nilai indeks pencapaian target kinerja			85	85	85	85	60,01%	0,00%	85	85	
8	Predikat Hasil Evaluasi Zona Integritas			WBK	WBK	WBK	WBK	-	-	WBK	WBK	
9	Predikat Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3 (3000)	Level 3 (3000)	Level 3	Level 4	
10	Predikat Mutu Sas SPMP			Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 2 (2638)	Level 2 (2638)	Level 3	Level 4	
11	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
12	Opini Audit BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
13	Jumlah Aktivitas konsultasi			60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	52 kali	-	60 kali	60 kali	
14	Jumlah APP yang mengikuti diliat			29 Orang	29 Orang	29 Orang	29 Orang	41 Orang	-	41 Orang	41 Orang	
15	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)			10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	8 Kegiatan	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	

Tabel T-C.33 (Tabel 4.1)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6 01	INSPEKTORAT DAERAH				Rp 10.908.024.352			Rp 10.811.968.339	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.PPU	7 kegiatan	Rp 8.648.907.679		7 kegiatan	Rp 8.798.882.208	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab.PPU	30 Laporan	Rp 100.070.500		30 laporan	Rp 100.000.000	
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi pemenuhan SPF, Penyempitan Laporan Hasil Kelayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Evaluasi Lapkin satuan kerja, Peningkatan Kapabilitas APSP)	Predikat Kapabilitas APSP	Kab.PPU	Level 3	Rp 100.070.500		Level 3	Rp 100.000.000	
		Predikat Maturitas SPF		Level 3			Level 3		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Nilai		B			B		
		Presentasi laporan data secara online hasil kelayaan Aparatur Sipil Negara yang telah terlaksana		1 Laporan			1 Laporan		
6 01 01 3.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.PPU	2 kegiatan	Rp 8.854.877.898		Belanja Pegawai	2 kegiatan Rp 8.858.700.208	
6 01 01 3.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kab.PPU	44 orang	Rp 6.535.917.598			44 orang Rp 6.508.280.208	
6 01 01 3.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab.PPU	12 Bulan	Rp 69.060.000			12 bulan Rp 51.420.000	
6 01 01 3.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 735.810.900			Rp 600.000.000	
6 01 01 3.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (PKS, diklat audi barang & jasa, diklat audi berbasis resiko, diklat audi forensik, diklat audi kinerja, diklat prototy	Jumlah pelatihan kantor sendiri	Kab.PPU	10 kali	Rp 624.860.000			10 kali Rp 500.000.000	
		Jumlah APSP yg mengikuti diklat audi		2 orang				2 orang	
		Jumlah APSP yg mengikuti diklat audi		2 orang				2 orang	
		Jumlah APSP yg mengikuti diklat audi		2 orang				2 orang	
		Jumlah APSP yg mengikuti diklat audi kinerja		2 orang				2 orang	
		Jumlah APSP yg mengikuti diklat prototy		3 orang				3 orang	
6 01 01 3.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi/peraturan perundang-undangan	Kab.PPU	1 Kegiatan	Rp 100.750.000			1 Kegiatan Rp 50.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan mjdj Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatf	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatf
6 91 91 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 360.284.818			Rp 331.000.000	
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan	Kab.PPU	12 Bulan	Rp 5.040.766		12 Bulan	Rp 5.000.000	
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Barang	Kab.PPU	12 Bulan	Rp 45.857.130		12 Bulan	Rp 45.000.000	
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Baku dan Pestisida Perunding-	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Bahan	Kab.PPU	12 Bulan	Rp 6.120.000		12 Bulan	Rp 6.000.000	
6 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (koordinasi pengawas yg lebih komprehensif)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kab.PPU	12 Bulan	Rp 336.246.900		12 Bulan	Rp 275.000.000	
6 91 91 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp -	Belum Teranggakan		Rp -	
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Kursi Lipat	Kab.PPU	34 Unit	Rp -	Belum Teranggakan	34 Unit	Rp -	
		Jumlah Pengadaan Meja Kerja		25 Unit			25 Unit		
		Jumlah Pengadaan Meja Rapat		2 Unit			2 Unit		
6 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan printer	Kab.PPU	3 Unit	Rp -	Belum Teranggakan	3 Unit	Rp -	
		Jumlah pengadaan AC		3 Unit			3 Unit		
		Jumlah pengadaan laptop		11 Unit			11 Unit		
		Jumlah pengadaan hard disk eksternal		1 Unit			1 Unit		
		Jumlah pengadaan UPS		5 Unit			5 Unit		
		Jumlah Lemari Arsip		10 Unit			10 Unit		
6 91 91 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 419.730.867			Rp 404.280.000	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Suci Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Suci Menyurat	Kab.PPU	12 Bulan	Rp 150.054.888		12 Bulan	Rp 150.000.000	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kab.PPU	12 Bulan	Rp 121.075.721		12 Bulan	Rp 119.582.000	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.PPU	12 Bulan	Rp 346.500.300		12 Bulan	Rp 354.500.000	
6 91 91 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 206.302.956			Rp 180.000.000	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kab.PPU	12 Bulan	Rp 161.192.000		12 Bulan	Rp 125.000.000	
6 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab.PPU	12 Bulan	Rp 30.002.400		12 Bulan	Rp 40.000.000	
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.PPU	12 Bulan	Rp 16.108.556		12 Bulan	Rp 20.000.000	
6 91 92	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	Kab.PPU		Rp 1.453.352.540			Rp 1.462.913.133	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				Rp 1.457.342.540			Rp 1.417.013.133	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase laporan terhadap hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan	Kab.PPU	06 Laporan	Rp 317.770.000		06 Laporan	Rp 317.013.133	
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (pelaksanaan pengawasan audit investigasi, pelaksanaan pengawasan probity audit, pelaksanaan pengawasan sekolah)	Jumlah UHP Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.PPU	11 Laporan	Rp 300.770.000		11 Laporan	Rp 300.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokal	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/paga Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/paga Indikatif
8 01 02 2 01 03		Revisi Laporan Kinerja (monitoring & evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara APP dgn APH serta antara APP dengan OMBUDSMAN, monitoring & evaluasi perencanaan dan penganggaran Raportif Gender, revisi LKIP Kabupaten, revisi LKIP, revisi revisi BGD, revisi BKA, revisi BAKSD)	Kab.PPU	19 Laporan	Rp 177.650.000		19 Laporan	Rp 175.000.000	
8 01 02 2 01 04		Revisi Laporan Keuangan (revisi DAK & LKPD)	Kab.PPU	9 Laporan	Rp 177.650.000		9 Laporan	Rp 175.000.000	
8 01 02 2 01 05		Pengawasan Desa (Pelaksanaan pengawasan desa & kelurahan, Pelaksanaan pengawasan Pro-P2KPM)	Kab.PPU	23 Laporan	Rp 280.327.500		23 Laporan	Rp 250.000.000	
8 01 02 2 01 06		Kerjasama Pengawasan Internal (Kerjasama pengawasan internal, pelaksanaan pengawasan jini audit)	Kab.PPU	4 Laporan	Rp 51.000.000		4 Laporan	Rp 50.000.000	
8 01 02 2 01 07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Kab.PPU	95%	Rp 162.775.040		95%	Rp 160.000.000	
				90%			90%		
8 01 02 2 02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.PPU	100%	Rp 75.310.000		100%	Rp 75.000.000	
8 01 02 2 02 02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab.PPU	5 Laporan	Rp 75.310.000		5 Laporan	Rp 75.000.000	
8 01 03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab.PPU		Rp 323.304.133			Rp 320.000.000	
8 01 03 2 02		Pendampingan dan Asistensi			Rp 323.304.133			Rp 320.000.000	
8 01 03 2 02 02		Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Evaluasi PMPRB)	Kab.PPU	85	Rp 52.075.000		85	Rp 50.000.000	
8 01 03 2 02 03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (koordinasi, monitoring & evaluasi serta verifikasi pencegahan & pemberantasan korupsi, pelaksanaan kegiatan saber pungi, pelaksanaan SPI, pelaksanaan aksi koordinasi & supervisi pencegahan korupsi)	Kab.PPU	4 laporan	Rp 270.829.133		4 laporan	Rp 270.000.000	
				1 laporan			1 laporan		
				2 laporan			2 laporan		
				WTP			WTP		
				WBK			WBK		
TOTAL						Rp 10.508.524.352		Rp 10.611.995.338	